

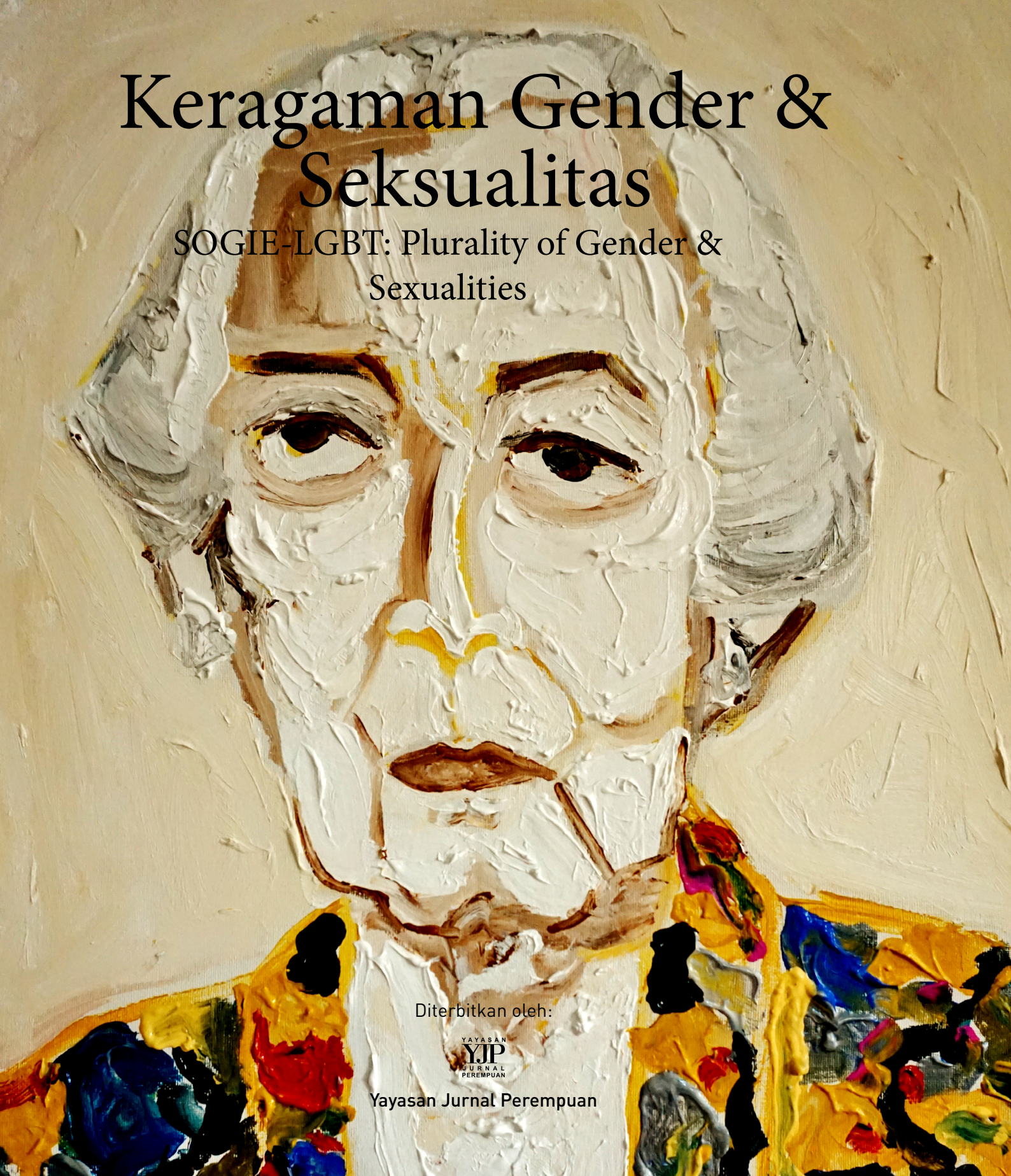
Keragaman Gender & Seksualitas

SOGIE-LGBT: Plurality of Gender &
Sexualities

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

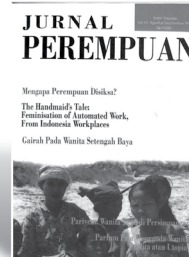
Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

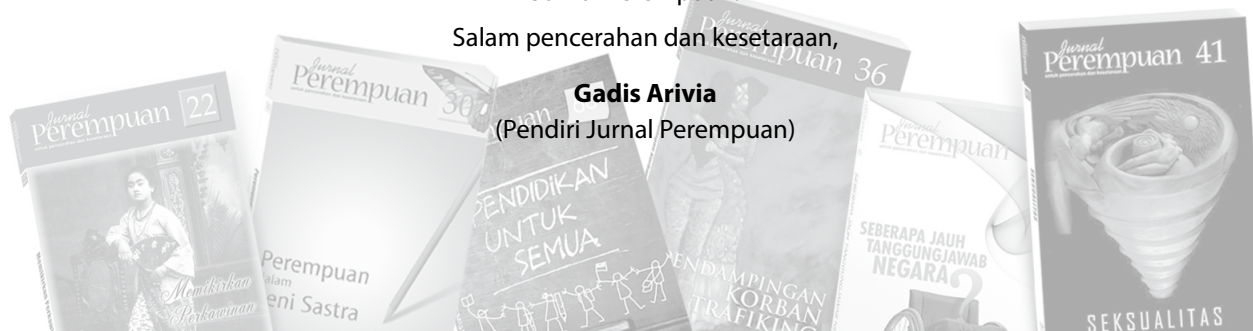
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, November 2015



FORDFOUNDATION



Ardhanary Institute
LBT Research, Publishes
and Advocacy Centre



Hivos
people unlimited

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: Mengapa SOGIE (<i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i>)?.....	iii
Artikel / Articles	
• Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE (<i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i>) di Nusantara / <i>Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic: Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara</i>	269-288
<i>BJD. Gayatri</i>	
• Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM (<i>Female to Male</i>) di Jakarta / <i>Self, Body, and Relation: a Study of FTM Transgender in Jakarta</i>	289-302
<i>Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno & Dewi Candraningrum</i>	
• "Mengapa Saya Mendirikan Suara Kita?" Sebuah Memoar / "Why I founded Our Voice": a Memoir	303-308
<i>Hartoyo</i>	
• Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual terhadap Lesbian, Biseksual, dan Transgender <i>Female-to-Male</i> di Indonesia / <i>Causes or Cures? Sexual Violence against Lesbian, Bisexual and Transgender Female-to-Male in Indonesia</i>	309-314
<i>Ayu Regina Yolandasari</i>	
• Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia / <i>Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News Media in Indonesia</i>	315-320
<i>Sari Andajani, Dinar Lubis & Sharyn Graham-Davies</i>	
• Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat / <i>Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in the Context of Indonesia and Western Europe Society</i>	321-327
<i>Tanti Noor Said</i>	
• Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer / <i>Mapping Body, Gender, and Sexuality in Queer Studies</i>	329-338
<i>Hendri Yulius Wijaya</i>	
• Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia / <i>LGBT's Human Rights in the Indonesian Interior Policies</i>	339-355
<i>Yulianti Muthmainnah</i>	
• LGBT, Agama dan HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl / <i>LGBT, Religion, and Human Rights: a Study on Khaled M. Abou El-Fadl's Thoughts</i>	357-366
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• "Makna Hidup" Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian Queer di Jakarta / "Meaning of Life" for LGBT when State Ignores: a Queer Study in Jakarta.....	367-376
<i>Gadis Arivia dan Abby Gina</i>	
Wawancara / Interview	
• David Kloos: "Perempuan Konservatif Mendominasi Formasi Kepemimpinan" / <i>David Kloos: "Conservative Women dominate Formation of Leadership"</i>	377-381
<i>Saras Dewi</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	383-385
Profil / Profile	
• Hana Salomina Hikayobi: "Terpanggil untuk Menyuarakan Kaum Tak Bersuara" / <i>Hana Salomina Hikayobi: "Compelled to voice the Voiceless"</i>	387-392
<i>Dewi Candraningrum & Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Tombois dan Femmes: Menantang Label Gender di Padang / <i>Tombois and Femmes: Against Gender Label in Padang</i>	393-395
<i>Nadya Karima Melati</i>	
Tokoh / Heroine	
• Tunggal Pawestri: "Dukungan Terbuka terhadap LGBT akan Mengundang Dukungan Yang Lain" / <i>Tunggal Pawestri: "Open Support for LGBT invite Other Support"</i>	397-404
<i>Anita Dhewy</i>	

Mengapa SOGIE (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression*)?

Komisi Internasional tentang Hak Asasi LGBT (*The International Gay and Lesbian Human Rights Commission* (IGLHRC)) merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang penting dalam menangani dan mengadvokasi isu pelanggaran HAM berbasis SOGIE (*sexual orientation, gender identity and expression*) ke PBB dan berbagai badan internasional lainnya. Organisasi ini tercatat dalam ESOSOC dan menjadikan organisasi untuk konsultasi yang dipercaya PBB, yang didirikan pada tahun 1990 oleh Julie Dorf di San Francisco. IGLHRC juga berkontribusi pada pembuatan Prinsip-Prinsip Yogyakarta (*Yogyakarta Principles*) di tahun 2010. Prinsip-prinsip Yogyakarta adalah prinsip-prinsip legal internasional mengenai orientasi seksual, identitas gender dan Undang-Undang internasional telah disampaikan kepada PBB dan pihak pemerintah dalam upaya memastikan keberadaan universal perlindungan HAM. Kelompok yang terdiri dari 29 ahli HAM internasional hari itu mengeluarkan pernyataan mengenai Prinsip-Prinsip Yogyakarta mengenai Aplikasi Undang-Undang HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender.

Prinsip-Prinsip tersebut menegaskan standar legal mengikat yang wajib dipatuhi oleh semua Negara. Prinsip-prinsip tersebut diadopsi oleh sekumpulan ahli dalam bidang Undang-Undang internasional dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan di Yogyakarta, Indonesia. Anggota kelompok ahli tersebut terdiri dari mantan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, ahli independen PBB, anggota dan mantan anggota lembaga perjanjian HAM, hakim, akademisi dan pembela HAM. Dalam pengantar aksinya hal 6 dinarasikan: "Kita semua memiliki kesamaan hak asasi manusia. Apapun orientasi seksual, jenis kelamin, identitas gender, kebangsaan, ras/etnisitas, agama, bahasa dan status lain yang kita

sandang, kita semua memiliki hak-hak asasi manusia (HAM) tanpa boleh disertai dengan diskriminasi". Pada aksi tersebut diakui dengan jelas keberadaan HAM atas dasar SOGIE.

Seringkali bias kekerasan atas dasar SOGIE dikarenakan mereka dituduh sebagai perihai baru dan 'barat', yang pada kenyataannya dalam struktur tradisional masyarakat mana pun, akan dapat ditemui dengan mudah eksistensi individu atau kelompok yang memiliki keberagaman gender dan seksualitas. Di Indonesia, di kalangan komunitas Bugis misalnya, bahkan dikenal setidaknya ada lima gender yang berbeda. Yang analog sama adalah *oroane* (laki-laki) dan *makkunrai* (perempuan), dan tiga lainnya disebut sebagai *bissu*, *calabai*, dan *calalai*. *Bissu* mewakili aspek perempuan dan laki-laki, yang menjadi pemimpin spiritual setelah naik haji. *Calabai* mewakili aspek terlahir sebagai laki-laki dan kemudian menjadi perempuan.

Sedang *Calalai* mewakili aspek yang terlahir sebagai perempuan dan kemudian menjadi laki-laki. Di samping tuduhan tersebut, tuduhan yang kerap ada adalah sebutan "sakit jiwa" atas dasar SOGIE mereka, padahal WHO, organisasi kesehatan dunia, telah menyatakan bahwa LGBT bukan fenomena sakit jiwa melainkan varian biasa dari seksualitas manusia.

Kini kita sudah memasuki era komunitas LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer*) yang eksis dan berperan di dalam masyarakat. Namun masalahnya apakah komunitas LGBTIQ telah terrepresentasi secara adil di media? Kevin Barnhurst dalam bukunya berjudul "Media Queered" (2007), menjelaskan bahwa komunitas LGBTIQ telah lama dibungkam di media. Ia mengadvokasi perlunya visibilitas komunitas LGBTIQ di media agar memperlihatkan masyarakat yang plural. Media *mainstream* masih terjebak antara "menertawakan"

kecirian LGBTIQ atau “mengeksotiskan” dan bahkan kadang digambarkan sebagai “predator”. Padahal apa yang perlu dilakukan media adalah memperlihatkan adanya cara berada yang berbeda, unik dan sekaligus mentransformasikan perubahan dan mengikis homofobia (kebencian & ketakutan pada kalangan homo). Kritik terhadap media diperlukan agar media sadar atas ketidakadilan yang terjadi dan ikut memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang mencerahkan. Sesungguhnya tujuan utama dari sensitivitas media terhadap LGBT adalah untuk membangun dialog antara media dan komunitas LGBT dalam menegakkan HAM. Untuk itulah JP Edisi 87 ini diterbitkan.

Dalam bukunya *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (London: Routledge, 1999), Judith Butler menarasikan bahwa “Cultural configurations of sex and gender might then proliferate or, rather, their present proliferation might then become articulable within the discourses that establish intelligible cultural life, confounding the very binarism of sex, and exposing its fundamental unnaturalness. What other local strategies for engaging the ‘unnatural’ might lead to the denaturalization of gender as such?” (hal 190). Butler melemparkan kemungkinan yang melampaui binerisme, pada sesuatu yang kemudian manusia biasa menyebutnya sebagai alamiah. Teori Queer merupakan salah satu persebaran dari teori-teori kritis pos-strukturalis yang lahir pada tahun 1990-an dan disokong secara kuat dalam filsafat feminisme. Di samping Butler, teori ini juga dibangun oleh nama-nama seperti Monique Wittig, Teresa de Lauretis, Lauren Berlant, Leo Bersani, Lee Edelman, Jack Halberstam, David Halperin, Jose Esteban Munoz, Eve Kosofsky Sedgwick, dan lain-lain.

“Bahwa lesbian bukan perempuan” dilontarkan oleh Monique Wittig di tahun 1980 dalam “La Pensée straight” sebagai bagian dari mengurangi kecemasan modernitas dalam menghadapi esensialisme metafisika kehadiran (muasal politik identitas Foucault). Jika Beauvoir menyatakan bahwa seseorang tak terlahir sebagai perempuan, tetapi ‘menjadi’ perempuan; maka Wittig memberikan penekanan pada kata ‘perempuan’: bahwa seseorang

tak terlahir sebagai ‘perempuan’ secara alamiah. Kedua kalimat tersebut sama, tetapi karena penekanan yang berbeda, kemudian menghasilkan makna yang tidak sama dalam diskursus sosial, politik, ekonomi dan terlebih dalam politik linguistik dan politik identitas. Lesbian adalah konsep yang melampaui kategori, bagi Wittig, karena lesbian melampaui identitas laki-laki atau perempuan dalam statusnya atas reproduksi, atas perbudakan dalam keluarga. Sehingga, lesbian bukan perempuan, secara ekonomi, secara politik, secara ideologis. Lesbian sebagai identitas meretaskan dirinya dari identitas yang janggal dari menjadi perempuan, baru kemudian sampai pada lesbian. Atau bahwa lesbian melakukan perjalanan bolak-balik, dari menjadi perempuan, dari menjadi laki-laki, atau sebut saja dengan mudah dari menjadi ‘lesbian’ saja. Ia mengalami dan memikirkan subjektivitas kognitifnya atas ruang konseptual yang amat berisiko dan berbahaya karena ia berada dalam lubang-hitam yang tak diakui dalam diskursus manusia atas ‘dunia’. Sedang bahasa sebagai jalan mediasi, jalan representasi, merupakan ‘alat pembunuh’ pertama atas apa-apa yang berada di luar kategori sebagai ‘berbahaya’.

Diskursus ini dibangun dari pergulatan feminisme dalam melawan ide bahwa gender merupakan entitas esensialis-diri yang dibentuk dan dikonstruksi secara sosial-budaya, yang kemudian melahirkan identitas seksual yang dianggap “alamiah” padahal bukan. Teori ini mendenaturalisasi apa-apa yang normatif dan apa-apa yang disebut sebagai ‘melenceng’ dari kodrat alam. Queer berfokus pada sirkulasi jenis kelamin, gender dan hasrat. Tak hanya itu, ia juga membahas perihal *cross-dressing* (cara berpakaian berbeda dari ‘kodrat’ gender), interseksualitas, ambiguitas gender dan operasi kelamin. Teori ini kurang begitu berkembang dalam kajian-kajian di Indonesia, meskipun telah ada, tetapi tidak sebanyak dalam Kajian Wanita. JP Edisi 87 ini diterbitkan untuk publik luas dengan menarasikan beberapa sejarah gerakan LGBTIQ di Indonesia, disamping juga melakukan penelitian-penelitian paling kontemporer oleh dari atas untuk LGBTIQ. (Pemimpin Redaksi, **Dewi Candraningrum**)

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

BJD. Gayatri. Aktivis untuk Social Justice, Pendiri Koalisi Perempuan Indonesia, . Pendiri Suara Ibu Peduli, Mantan Penasihat Internasional Asia-Pasifik IGLHRC 1993-1997

Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression) di Nusantara

Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic: Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 269-288, 1 gambar, 37 daftar pustaka.

This paper is an overview toward SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression). This charted the history of lesbianism in Indonesia. Approach being used is feminist personal history. There are two approaches in advocacy of human-right based SOGIE. First, the advocacy toward KUHP (product of law) that is based on positive and gender-normative that will endangered the existence of LGBT in Indonesia. Second, SOGIE-activists shall understand fully the plurality of gender and sexuality that is home-grown in Indonesia. This is the best way to advocate the rights as an integral part of Nusantara culture.

Keywords: SOGIE, LGBTIQ, feminist personal history, advocacy.

Makalah ini merupakan pengantar tentang keberagaman gender dalam SOGIE-HAM. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah personal feminis (*feminist personal history*). Paper ini akan mengulas sejarah lahirnya gerakan lesbian di Indonesia. Terdapat dua hal untuk advokasi SOGIE ini. *Pertama* untuk perubahan dan perbaikan Undang-undang sedang terus terjadi di negeri Nusantara yang bhineka ini, misalnya melalui rancangan perubahan KUHP yang saat ini sedang berlangsung, yang akan mengkriminalisasi LGBTIQ, entah karena alasan panik moral atau apa. Dalam kerangka ini para akademisi atau ilmuwan profesi dan kelompok agama yang homofobik juga perlu dicermati. *Kedua*, negeri ini memiliki kekayaan "Keberagaman Gender dan Seksualitas" namun aktivis LGBTIQ, termasuk aktivis perempuan hampir tidak ada yang menggali kekayaan ini, sehingga kita tidak mengenali dan kemudian menjadi terasing dari akar-budaya sendiri.

Kata kunci: SOGIE (Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender), LGBTIQ, sejarah personal feminis, advokasi.

Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno & Dewi Candraningrum.
Ardhanary Institute & Jurnal Perempuan.
ardhanaryinstitute.org

Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM (Female to Male) di Jakarta.

Self, Body, and Relation: a Study of FTM Transgender in Jakarta

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 289-302, 20 daftar pustaka.

The existence of *Male to Female* (MTF) or in Indonesian word known as Waria is more popular than Female to Male (FTM). Existence of FTM or someone biologically born as woman but identified herself as man is not well-researched and well-documented. That is why this group is difficult to be identified in the public discourse. Jakarta was chosen in this research as this city represented FTM from other areas around

Indonesia. This study found that someone that biologically woman is not otomatically identified herself as woman. The process of self-definition is fluid. In the process of finding the self, FTM faced violences from states, society, work-place, and family.

Keywords: Self, FTM (Female to Male), Sex, Gender, Jakarta.

Eksistensi transgender *Male to Female* (MTF) atau yang secara umum sering kita dengar dengan istilah *Waria* lebih populer dibandingkan dengan transgender *Female to Male* (FTM). Eksistensi FTM atau seseorang yang terlahir secara biologis perempuan tetapi mendefinisikan dirinya sebagai laki-laki belum diangkat dan terdokumentasikan secara baik, sehingga eksistensi FTM sulit dikenali dalam diskursus publik. Pemilihan Jakarta sebagai area penelitian karena merupakan kota urban yang merepresentasikan Indonesia. Responden yang diinterview berjumlah 22 orang, dan di dalam perjalanan penelitian, 5 FTM dari luar Jakarta. Studi FTM ini menemukan bahwa seseorang tidak secara otomatis akan mendefinisikan gendernya sesuai dengan seks/jenis kelamin biologisnya. Mereka membentuk identitas dirinya sendiri secara subjektif melalui proses pendefinisian diri. Dalam perjalanan menuju "diri", FTM mengalami banyak kekerasan baik dari Negara, masyarakat, tempat kerja dan keluarga.

Kata Kunci: Diri, FTM (Female To Male), Seks, Gender, Jakarta.

Hartoyo. Pendiri dan Ketua Suara Kita & Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia
www.suarakita.org

"Mengapa Saya Mendirikan Suara Kita?" Sebuah Memoar "Why I founded Our Voice": a Memoir

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 303-308, 8 daftar pustaka.

Reformation Era has brought equality to any social movement such as LGBT circle. This era asked and gave opportunity to engage actively in the governance in many ways. Those that entered formal politics, or outside of formal politics such as NGO and community service. LGBT issue is becoming new term in the activism in Indonesia and that is why I established Suara Kita (Our Voice) to celebrate our identity and social justice. This paper narrated the establishment of this organization up to the present time under repression of the society.

Keywords: LGBT, Our Voice, reformation era, social justice.

Harus diakui reformasi membawa angin segar bagi setiap gerakan sosial dalam isu apapun, termasuk kelompok LGBT. Di era reformasi, publik dipaksa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan dengan beragam cara. Ada yang masuk ke politik formal, tetapi ada yang memilih di luar jalur atau sistem politik. Semua peluang itu terbuka di era reformasi. Tetapi harus diakui, pada isu LGBT karena gerakan identitas masih relatif baru dalam gerakan sosial, maka peluang reformasi baru bisa ditangkap atau direspons untuk mengangkat isu LGBT dalam wacana publik. Tulisan ini menjelaskan perjalanan Suara Kita sejak berdiri sampai dengan sekarang sebagai organisasi LGBT yang konsisten menyuarakan keadilan sosial.

Kata kunci: LGBT, Suara Kita, era reformasi, keadilan sosial.

Ayu Regina Yolandasari. Women's Studies, Ewha Womans University, Korea Selatan & Ardhany Institute. 52 Ewhayeodae-gil, Seodaemun-gu, Seoul, South Korea. Phone:+82 2-3277-2114

Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual terhadap Lesbian, Biseksual, dan Transgender Female-to-Male di Indonesia

Causes or Cures? Sexual Violence against Lesbian, Bisexual and Transgender Female-to-Male in Indonesia

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 309-314, 13 daftar pustaka.

Sexual violence is a crime in which the victims are usually blamed for being the cause. When it happened to a cisgender heterosexual woman, many people tend to use her appearance and her behavior to justify the victim blaming. It would even be more complicated for lesbian, bisexual women, or female-to-male transgender (LBT). When sexual violence happened to them, their sexual and/or gender identity tend to be added on the reasons to justify the perpetrators' actions. Strangely, in contrast to that, this crime is also usually thought as the cause of their being LBT. This paper is aimed to explore this paradoxical thoughts of sexual violence against LBT, its effects on LBT's lives, and efforts made to break through the paradox itself.

Keywords: LBT (Lesbian, Bisexual, Transgender), sexual violence, Indonesia.

Kekerasan seksual adalah sebuah kejahatan dimana korban sering kali menjadi pihak yang disalahkan karena dianggap sebagai penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Ketika kejahatan ini terjadi pada perempuan cisgender heteroseksual, banyak orang yang cenderung menjadikan penampilan dan tingkah laku korban sebagai justifikasi untuk menyalahkannya. Saat kejahatan yang sama terjadi pada lesbian, perempuan biseksual, dan transgender *female-to-male* (LBT), situasinya pun menjadi lebih kompleks, di mana identitas seksual dan/atau identitas gender mereka cenderung dijadikan alasan tambahan untuk menjustifikasi tindakan pelaku terhadap mereka. Anehnya, berlawanan dengan hal tersebut, kejahatan ini juga sering kali dianggap sebagai penyebab seseorang menjadi LBT. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi paradoks terkait kekerasan seksual terhadap LBT, dampaknya pada kehidupan LBT, dan upaya yang dilakukan untuk membongkar paradoks itu sendiri.

Kata kunci: LBT (Lesbian, Bisexual, Transgender), kekerasan seksual, Indonesia.

Sari Andajani, Dinar Lubis & Sharyn Graham-Davies. Faculty of Health and Environmental Sciences & Faculty of Culture and Society Auckland University of Technology . 55 Wellesley Street East, Auckland Central

Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia

Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News Media in Indonesia

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 315-320, 31 daftar pustaka.

As a signatory to the Beijing Convention, Indonesia has the responsibility to live up to certain expectations, one of these is to safe guard human rights and the right to freedom of sexuality and access to sexual health. In this article we show this is not the case. In particular, because police are allowed to conduct raids on hotels and people are too scared to be open about their sexuality. As a result of being scared, people are not

able to access sexual health care. Police raids are imposing a sexual morality agenda and the media is exploiting such raids by using horrific pictures, denigrating language maintaining stigmatization. If Indonesia is to get serious about HIV prevention, discrimination against GBV, police raids and violence against LGBT must stop.

Keywords: raids, sexual minorities, LGBT, HIV/AIDS.

Sebagai negara yang menandatangani Konvensi Beijing, Indonesia memiliki mandat dan tanggung jawab untuk mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak warga negaranya akan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi, tanpa diskriminasi. Artikel ini menunjukkan bahwa, situasi penegakan hak-hak asasi manusia akan kesehatan seksual dan reproduksi adalah sangatlah jauh dari harapan. Tulisan ini mengangkat wacana akan peran polisi dan masyarakat awam, kelompok *vigilante*, dalam melakukan razia di hotel-hotel dan tempat-tempat yang dinyatakan rentan akan perilaku seksual menyimpang. Yang kesemuanya itu memupuk rasa takut dan mereka kelompok ragam identitas gender dan seksualitas tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan. Razia polisi yang diwacanakan sebagai agenda penegakan moralitas masyarakat dan eksploitasi media massa dengan gambar yang seram, tidak santun, bahasa yang melecehkan justru makin melestarikan stigma sosial terhadap kelompok LGBT. Apabila Indonesia mempunyai niat serius dengan upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS, semua pelecehan terhadap kelompok-kelompok LGBT dan minoritas seksual lainnya haruslah dihentikan.

Kata kunci: razia, minoritas seksual, LGBT, HIV/AIDS.

Tanti Noor Said. Universiteit van Amsterdam. 1012 WX Amsterdam, Netherlands. Phone:+31 20 525 9111

Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat

Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in the Context of Indonesia and Western Europe Society

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 321-327, 15 daftar pustaka.

This paper attempts to analyze how Indonesian gay males and transgenders male to female in two different social, cultural and political contexts (in Indonesia and Northern Europe) are actively engaged in the making of their own subjectivity. Their subjectivities are entangled with gender, sexuality, religion, romantic love relationships and kinship. They juggle in negotiating and making sense of norms and values of societies that projected towards them. This paper aims to shed light on gender politics of gay and transgender Indonesians in the context of heterosexual hegemony and migration.

Keywords: transnational migration, LGBT activism, gay, transgender.

Tulisan ini menganalisis bagaimana gay dan transgender dalam dua dunia yang berbeda, secara sosial, budaya dan politik, yaitu Indonesia dan Eropa Barat, aktif berpartisipasi dalam pembentukan subjektivitasnya. Subjektivitas gender dalam kajian ini terkait dan tak dapat dipisahkan dari seksualitas, agama, hubungan romantis mereka dengan laki-laki dari Eropa Barat dan tali ikatan persaudaraan mereka dengan keluarga mereka di Indonesia. Mereka berjuang menegosiasikan norma dan nilai masyarakat yang yang diproyeksikan oleh masyarakat terhadap mereka. Kajian ini menyimpulkan bahwa subjektivitas gender dan seksual seseorang yang minoritas ditentukan oleh struktur yang dominan di dalam masyarakat.

Kata kunci: migrasi, transnasional, subjektivitas, aktivisme LGBT, gay, transgender.

Hendri Yulius Wijaya. Lee Kuan Yew School of Public Policy,
National University of Singapore. 469C Bukit Timah Rd,
Singapore 259772. Phone:+65 6601 2875

Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer

Mapping Body, Gender, and Sexuality in Queer Studies

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 329-338, 1 gambar, 1 tabel, 24 daftar pustaka.

This paper examines the complexities of human sexuality by challenging assumptions that have been built on binarism and biological-determinism. This attempt is done by examining the development of sexuality theory and studies from feminism to queer theory, through the lens of some theorists, from Michel Foucault, Judith Butler, Jack Halberstam, to Sara Ahmed. In addition, the development of sexuality studies in Indonesia is also explored, in order to show a myriad of interactions and relations of knowledge between global and local. Queer theory also provides space to criticize the hegemony of existing 'labels' which are originated from the West, and also to show that the meaning and subjectivity shaped by these labels are not always fixed when they are transferred to Indonesian context. For above reasons, this paper introduces the theoretical concept of sex(t)uality—in which sexuality operates like text.

Keywords: Sex, text, queer, global, local, feminism, sex(t)uality.

Makalah ini menganalisis kompleksitas seksualitas manusia dengan menantang asumsi-asumsi yang dibangun atas pemikiran biner yang biasanya memiliki kecenderungan deterministik biologi. Upaya ini dilakukan dengan memaparkan perkembangan teori seksualitas mutakhir, mulai dari feminisme hingga kajian queer, melalui teori-teori Michel Foucault, Judith Butler, Jack Halberstam, hingga Sara Ahmed. Selain itu, perkembangan kajian seksualitas di ranah lokal juga turut dipaparkan untuk melihat bagaimana interaksi dan relasi pengetahuan antara tingkat global dan lokal. Pendekatan teori queer juga memberikan ruang untuk melakukan kritik terhadap hegemoni label seksualitas yang dibawa dari Barat dan menunjukkan bahwa label-label tersebut tidak selalu memiliki makna yang sama dengan asalnya. Inilah alasan mengapa konsep sex(t)uality/ seks(t)ualitas diperkenalkan di sini, bahwa seksualitas beroperasi seperti layaknya teks.

Kata Kunci: Seks, teks, queer, global, lokal, feminisme, sex(t)uality.

Yulianti Muthmainnah. Program Studi Diplomasi, Pascasarjana
Universitas Paramadina. The Energy Tower 22nd Floor, SCBD
Lot. 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia1

LGBT's Human Rights in the Indonesian Interior Policies

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 339-355, 1 tabel, 37 daftar pustaka.

Human rights which were convened by international laws and United Nations is at present universally ideal. However in implementation, this universality was constrained by interior politics, sovereignty, religious interpretation, and culture. Issues of LGBT has received wave of protests internationally and nationally though their rights are guaranteed within laws. Include LGBT issue has been debated on the national and local level. On the other hand, state has responsibility to promote, to protect, and to fulfill human rights for every single person, even people with sexual orientation and gender identity from any harms and violences. This paper will explore how human rights in Indonesia interior politics will protect LGBT groups.

Keywords: human rights, LGBT, interior politics.

Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah disepakati hukum internasional dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara ideal harus bersifat universal. Akan tetapi, dalam implementasinya, atas nama kepentingan dalam negeri, kedaulatan negara, agama, ataupun budaya, keuniversalitasan HAM ini dibatasi oleh negara atau pihak-pihak tertentu, sehingga HAM menjadi relatif dalam pelaksanaannya. Termasuk pada isu LGBT yang masih menuai perdebatan baik di tingkat lokal maupun nasional. Padahal pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM LGBT menjadi tanggung jawab negara. Tulisan ini akan mengurai bagaimana hak asasi manusia LGBT dilaksanakan dalam kebijakan dalam negeri Indonesia.

Kata kunci: hak asasi manusia, LGBT, politik dalam negeri.

Masthuriyah Sa'dan. Solidaritas Perempuan Kinasih & UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Telp:(0274) 589621

LGBT, Agama dan HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl

LGBT, Religion, and Human Rights: a Study on Khaled M. Abou El-Fadl's Thoughts

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 357-366, 16 daftar pustaka.

The Fatwa "Haram" of MUI against homosexual orientation (LGBT) and the death penalty against LGBT had shaken the Indonesian, and further marginalized "third" gender people. "Religion" is urged to provide justice to the Ummah but the Ulama did the opposite thing by discriminating sexual minorities. The legal instrument of regional, national and international human rights has recognizes LGBT rights as basic human rights. Islamic religion in this case Shari'ah and Islamic law is used as a theological foundation by MUI to issued the fatwa that is contrary to the concept of human rights. The progressive interpretation of Khaled M. Abou El-Fadl became important to be studied to protect LGBT. Khaled attempted to break up the tension between religion (Islam) and human rights by using the social approach of contemporary humanities. By this means, Abou El-Fadl introduced a scheme of protection to LGBT under Quranic Syariah Law.

Keywords: LGBT, religion, human rights, Khaled M. Abou El-Fadl.

Fatwa "haram" MUI terhadap kelompok homoseksual (LGBT) dan hukuman mati terhadap pelaku seksual "menyimpang" membuat rakyat Indonesia terganggu, khususnya mereka yang merasa memiliki identitas gender "ketiga". "Agama" yang seharusnya memberikan jalan kemudahan, seolah-olah mengubur hidup-hidup seseorang yang memiliki orientasi seksual homo. Padahal, instrumen hukum regional, nasional dan internasional tentang HAM mengakui hak-hak mereka sebagai manusia. Agama Islam dalam hal ini syari'ah dan hukum Islam yang dijadikan landasan teologis fatwa MUI bertolak belakang dengan konsep HAM. Dengan demikian, pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl menjadi penting untuk dikaji. Khaled berupaya meleraikan ketegangan antara agama (Islam) dan HAM dengan menggunakan pendekatan *social humanity contemporary*.

Kata kunci: LGBT, Agama, HAM, Khaled M. Abou El-Fadl.

Gadis Arivia dan Abby Gina. Departemen Filsafat, FIB,
Universitas Indonesia. Kampus UI Depok Jawa Barat
16424, Indonesia. Telepon, : +62.21.7270009. Faksimile, :
+62.21.7270038

**“Makna Hidup” Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian
Queer di Jakarta**

**“Meaning of Life” for LGBT when State Ignores: a Queer
Study in Jakarta**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 367-376, 1 gambar,
9 tabel, 16 daftar pustaka.

This study provides an overview of problems faced by LGBT in Indonesia. There are four issues raised i.e. the meaning of gender and sexual orientation, violence and abuse, the role of the state, and the meaning of happiness. This study uses a sample of 60 respondents living in big cities, especially in Jakarta. However, the strength of this study lies not in the result of the survey, but the result of the in-depth interviews.

From this study it was found that in the context of a conservative state, the respondents are more open through interviews. This study unearths LGBT's meaning of life under the repressive and absence role of the state.

Keywords: LGBT, meaning of life, violence, state.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang persoalan yang dihadapi LGBT di Indonesia. Ada empat isu yang mengemuka yaitu soal makna gender dan orientasi seksual, kekerasan dan pelecehan, peran negara, dan makna hidup bahagia bagi LGBT. Penelitian ini menggunakan 60 sample responden yang hidup di kota besar terutama di Jakarta. Namun, kekuatan dari penelitian ini tidak terletak pada hasil survei melainkan pada hasil wawancara mendalam. Dari penelitian ini ditemukan bahwa para responden, dalam konteks negara konservatif, lebih bisa terbuka lewat wawancara dan bukan lewat pengisian kuesioner. Kajian ini mengungkap makna hidup bagi LGBT di bawah Negara yang represif dan abai pada kelompok minoritas.

Kata Kunci: LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender), makna hidup, kekerasan, negara.



David Kloos:

“Perempuan Konservatif Mendominasi Formasi Kepemimpinan”

David Kloos: “Conservative Women dominate Formation of Leadership”

Saras Dewi

Dept Filsafat, FIB, Universitas Indonesia

sarasdewi@yahoo.com

David Kloos adalah sejarawan dan antropolog mengkaji Asia Tenggara. Sekarang ia merupakan peneliti di KITLV (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies), di Leiden, Belanda. Kajian sebagai besar tentang kepemimpinan perempuan Islamiyah di Asia Tenggara yang mengeksplorasi perkembangan dampak sosial dan politik kewenangan pemimpin perempuan (seperti ulama perempuan, pendakwah, dan pemimpin partai atau organisasi Islamiyah) dalam masyarakat Indonesia dan Malaysia. Disertasi tentang sejarah praktik Islam dan keseharian Islam di Aceh. Dalam disertasinya I berfokus pada proses panjang personalisasi praktik-praktik keberagaman di Aceh dari abad ke-18

sampai dengan sekarang. Pada edisi ini, Saras Dewi melakukan wawancara perihal kepemimpinan perempuan di Aceh.

Dapatkah anda menjelaskan kepada pembaca Jurnal Perempuan berkenaan dengan proyek “Kepemimpinan Perempuan Islam di Asia Tenggara”?

Saya akan menjelaskan garis besarnya, penelitiannya lebih komparatif dibandingkan dengan studi saya sebelumnya lebih terfokus pada Aceh. Penelitian kali ini melibatkan enam lokasi; Aceh, Penang, Jakarta, Kuala Lumpur, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Alasan saya memilih tempat tersebut, misalnya Aceh dan Penang memiliki tradisi matrilinealitas, yaitu perempuan secara adat

diwariskan rumah dan sebagian sumber produksi penting (*key production resources*). Sementara itu, sampai sekarang kaum lelaki yang menikah biasanya masuk ke dalam keluarga istri, mereka pindah ke desa sang perempuan. Data tersebut penting untuk melihat munculnya kepemimpinan perempuan Islam. Hal yang menarik tentang Aceh, citra bahwa kawasan itu merupakan daerah Islam ortodoks serta pandangan bahwa hukum syariah tidak ramah terhadap perempuan. Namun sisi lain, di masyarakat Aceh, khususnya di pedesaan, perempuan memiliki posisi kuat. Wilayah lain, Jakarta dan Kuala Lumpur, saya mengamati tren urban menunjukkan naiknya ustadzah perempuan, hingga muncul di televisi. Dilanjutkan di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur saya mengamati dominannya tradisi ulama lelaki, juga para kyai, yang sesungguhnya bertolak belakang dengan fenomena di Aceh dan Penang. Dalam riset komparatif semacam itu, temuan saya adalah corak kepemimpinan perempuan Islam berbeda-beda terkait dengan latar belakang daerah yang ditempati. Perbedaan itu mencakup konteks, tradisi kultural, relasi sosial, dan politik.

Mengapa anda memilih Aceh dalam riset-riset yang telah anda lakukan?

Berawal dari kunjungan yang saya lakukan saat berlibur dari riset S2 di Universiti Sains Malaysia, Penang. Saat itu dua tahun selepas tragedi tsunami, saya memiliki teman-teman yang mengajak saya berkeliling Banda Aceh, dan daerah lainnya. Hal-hal yang terjadi di Aceh sangat menarik menurut saya, bagaimana masyarakat Aceh menyintas dari musibah alam tsunami, juga pasca konflik GAM-Militer, dan penerapan hukum Syariah. Kesemua itu membuat saya ingin mendalami Aceh. Orang Aceh terkenal karena ketangguhannya. Kala saya berbicara dengan para penyintas musibah tsunami, pembicaraan ini meninggalkan kesan mendalam. Ketika kembali ke Belanda saya mencari buku tentang Aceh, meski sudah diterbitkan buku sejarah tentang Aceh. Namun, saya menilai masih sedikit sekali teks maupun kajian yang mencermati bagaimana masyarakat Aceh hidup dalam kesehariannya dengan Islam sebagai keyakinan. Ada beberapa buku-buku etnografis yang bagus mengenai Aceh; *The Rope of God* diterbitkan 1969 oleh James T. Siegel, lalu pada tahun 2002 Jacqueline Siapno yang melakukan kajian antropologis Aceh pasca konflik. Minimnya riset mengangkat bagaimana keseharian orang Aceh yang hidup di pedesaan dan perkotaan mendorong saya

untuk mencari tahu bagaimana masyarakat Aceh hidup dengan pandangan Islaminya. Selain hidup bersama dan bicara dengan masyarakat biasa, Saya mewawancarai para ulama di Aceh, baik konservatif maupun progresif. Terkait dengan penelitian yang tengah dilakukan sekarang tentang peran perempuan Islam, saya menemukan data penting. Saya mewawancarai ulama perempuan yang memimpin pesantren, yang menurut saya sangat mengherankan.

Dapatkah gagasan feminisme kompatibel dengan Islam di Aceh?

Tentunya, tetapi ada berbagai macam pandangan feminisme. Dengan begitu, tergantung bagaimana konsep tersebut dipahami. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, ada situasi menarik di Aceh. Saat saya bicara dengan ulama perempuan yang memimpin pesantren, terlihat bagaimana perempuan Aceh di satu sisi dapat menjadi cukup progresif. Ada di pihak itu yang mendorong kekuatan posisi perempuan di publik, tetapi sisi lainnya konservatif di bidang agama dan mendukung syariah. Tentunya dari perspektif feminisme barat yang cenderung sekular akan sangat membingungkan. Sebab, di satu sisi mendukung hak perempuan, tetapi dalam hal lainnya, mementingkan moralitas publik dengan cara yang membatasi perempuan. Memang dari perspektif feminisme di dunia barat, itu membingungkan, tetapi demikian faktanya.

Para ulama perempuan itu mendorong agar para perempuan semakin partisipatif dalam kancah politik di Aceh. Mereka mendorong agar perempuan menolak peraturan yang merugikan kaumnya sendiri. Menurut saya, mereka adalah feminis. Namun, ada perbedaan menarik dengan para feminis di Barat, yang sebagian besar, sekular dan liberal. Dalam isu aborsi, misalnya; para perempuan Aceh menentang aborsi atas alasan agama, tentunya sangat bertolak belakang bagaimana feminisme *pro-choice* di Barat. Pasalnya, mereka memiliki keterlibatan untuk memperkuat posisi perempuan di masyarakat. Dengan demikian, kesimpulan saya, seseorang dapat menjadi feminis melalui perspektif sekuler, tetapi juga dapat juga dilatari motif religius.

Dari sisi kebijakan ada persoalan cukup penting, lantaran banyak NGO, termasuk organisasi di Indonesia dilatari pandangan barat atau sekuler. Hal itu seringkali membuat mereka kurang menyadari adanya dorongan tertentu di masyarakat yang nyatanya dapat membantu program kerjanya. Dengan begitu, saya berkeyakinan, riset ini dan

penelitian lain mengenai misalnya kepemimpinan perempuan Islam konservatif dapat menarik perhatian sejumlah NGO itu guna menjalankan programnya, termasuk kebijakan yang nantinya dibuat pemerintah. Hal yang perlu diperhatikan, bagaimana membangun komunikasi di antara komunitas tersebut. Pasalnya, begitu banyak otoritas yang sebenarnya dimiliki perempuan, termasuk mereka yang hidup di desa. Terkadang kuasa macam itu yang tidak diketahui para NGO. Barangkali organisasi itu kehilangan koneksi dengan masyarakat lokal yang ingin diberdayakan.

Apakah ada NGO yang bekerja sama dengan ulama lokal?

Percakapan dan kolaborasi sudah sempat dilakukan, tetapi harus lebih banyak lagi. Misalnya, collega dan teman saya, Prof. Eka Srimulyani dari UIN Ar-Raniry di Banda Aceh, dia merupakan penulis pertama menyoroti perempuan ulama di Indonesia, khususnya ulama perempuan pesantren di Jawa. Seperti saya, dia juga mempelajari ulama perempuan di Aceh. Dia juga terlibat di sejumlah NGO yang bekerja sama dengan para ulama, misalnya saat menyangkut isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Singkat kata, kolaborasi itu telah ada. Namun, ke depannya penting untuk menyediakan beasiswa, menempatkan NGO di pesantren-pesantren guna duduk bersama memikirkan bagaimana meningkatkan peran perempuan. Seseorang seperti Eka Srimulyani cukup penting dalam menjalani proses tersebut.

Pertanyaannya kini terkait kondisi kekinian, yaitu kebijakan jam malam di Banda Aceh. Apa opini anda terkait hal tersebut?

Saya harus mengakui tidak sedang banyak terlibat di Banda Aceh, tetapi saya banyak membaca berita dan mengamati perdebatan yang terjadi dalam diskusi belakangan ini. Menurut saya, situasi itu memang cukup kontroversial. Opini saya tentang kebijakan jam malam itu tidak secara literal tentang jam malam. Namun, aturan itu merupakan tentang pekerja perempuan di sektor ekonomi tertentu, pariwisata dan kafe internet/warnet misalnya. Aturannya, perempuan itu tidak dapat bekerja di tempat semacam itu pada jam malam tertentu. Namun, peraturan itu kelihatan ditujukan pada seluruh perempuan di wilayah tersebut. Menurut saya, untuk banyak perempuan, kebijakan itu tidak masuk akal. Sulit dibayangkan sekarang di Banda Aceh, misalnya para pelajar yang sering

memanfaatkan kedai kopi di sana, bahkan juga teman-teman perempuan muda saya menghadapi kondisi cukup problematis terkait ketentuan itu. Jika masyarakat setempat ditanyai kebijakan tersebut, mungkin kebanyakan akan berkata hal itu baik. Pasalnya, afirmasi tersebut merupakan jawaban yang paling mudah dan dikehendaki sosial. Namun saya meyakini riilnya, banyak yang sulit menerima kebijakan tersebut.

Apakah mereka takut atas hukuman sosial?

Banyak dari mereka takut dipermalukan di depan publik. Ketakutan itu ada. Kebijakan itu dianggap dapat menolong lantaran banyak dari perempuan muda di sana takut diberhentikan di jalan, dilecehkan, dan dipermalukan depan publik. Perlu diketahui juga, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'adudin Djamal yang mengeluarkan kebijakan itu, merupakan pemimpin yang cukup keras. Fenomena itu cukup menarik lantaran tidak hanya lelaki konservatif yang mengusung pembatasan terhadap perempuan, tetapi juga didukung pihak perempuan konservatif.

Banyak pihak beranggapan hukum syariah cukup problematis. Jam malam merupakan contoh kebijakan yang hanya tajam untuk perempuan kebanyakan. Namun, bagi mereka yang kaya atau berpengaruh, aturan itu agaknya kurang begitu diberlakukan mengingat mereka dapat melakukan apapun yang diinginkan. Contohnya saja, jika mereka ingin hiburan malam (*nightlife*), dengan mudah dapat pergi ke Medan. Menyadari kemungkinan itu, saya berpendapat ada celah di hukum syariah itu sendiri. Meski begitu, peraturan itu tetap diberlakukan. Saya tidak yakin apakah mereka *enforcing it*. Mereka cukup kritis terhadap hal itu, terutama dari wakil presiden. Saya tidak tahu apakah kebijakan itu akhirnya diterapkan, tetapi Banda Aceh merupakan daerah otonom. Perlu diketahui pula, Presiden Joko Widodo cukup kritis terhadap regulasi daerah, termasuk hukum syariah. Banyak dari rakyat Aceh yang sebenarnya berharap presiden mengatakan atau setidaknya berbuat sesuatu terhadap persoalan itu. Pemerintah dapat saja melakukan sesuatu, tetapi hal itu cukup rumit untuk mengintervensi kebijakan lokal di Aceh.

Sebelumnya anda menyebut, ide feminis diterima dan diterapkan berbeda di berbagai daerah. Anda beranggapan perempuan di Aceh yang memimpin pesantren adalah feminis, setidaknya mereka kompatibel terhadap gagasan itu. Dapatkah anda menjelaskan lebih lanjut terkait

persoalan ini?

Sebelumnya, perlu dipahami, saya tidak mengetahui apakah mereka nyaman dengan label feminisme. Mereka cukup hati-hati menggunakan atribut atau mengungkap sesuatu yang terasosiasi langsung dengan gerakan feminis. Salah satu alasannya, ekspresi itu terkait dengan gender. Banyak NGO meyakini, gender merupakan konstruksi sosial. Namun, bagi para ulama, terutama ulama laki-laki, persoalan gender adalah kesetaraan antara perempuan dan lelaki. Bagaimanapun, cukup rentan membicarakan feminisme dalam konteks itu, misalnya saja saat memperbincangkan konsep gender. Akan tetapi, penggunaan term feminis dapat berujung masalah bagi mereka, sehingga seringkali istilah lain lebih dipertimbangkan, misalnya *musawah*. Itu adalah strategi mengatasi ketidaknyamanan perempuan lokal itu terhadap konsep gender atau feminisme, yaitu penggunaan ungkapan lain. Menurut saya, tidak masalah terhadap penggunaan istilah yang berbeda mengingat tujuannya tetap kompatibel dengan feminisme itu sendiri. Saya dapat menggunakan feminisme sebagai perangkat analisis guna melihat sejumlah tindakan dari komunitas tertentu yang berusaha memberdayakan sekaligus meningkatkan peran perempuan di masyarakat. Istilah itu digunakan untuk membedakan, secara analitis, tindakan yang dilakukan mereka itu tidak sama dengan perempuan lainnya. Feminis akademis banyak berkuat pada persoalan produksi pengetahuan. Dalam proyek riset saya ini, dapat dikatakan penelitian tentang feminis, mengingat masih sedikit pendalaman terhadap kepemimpinan perempuan.

Meski, kami telah mengusung affirmative action, tetap partisipasi perempuan belakangan ini tidak begitu besar?

Situasi itu memang cukup sulit, mengingat latar historis yang patriarkal, didominasi lelaki. Meski banyak menteri perempuan, tetapi kurang menempati posisi strategis. Akan tetapi, perubahan itu memang terjadi lambat, khususnya terhadap mentalitas laki-laki dan perempuan itu sendiri. Dalam level tertentu, perempuan mesti berani tampil dalam panggung politik. Situasi itu terkait dengan kultur politik yang berubah sangat lambat. Menurut saya, kebijakan tertentu akan cukup membantu. Situasi itu tampaknya memang perlu diperhatikan pemerintah. Namun, perlu diketahui, menteri luar negeri saat ini adalah perempuan. Dalam pemerintahan sebelumnya, juga ada jabatan kementerian strategis dipegang

perempuan. Sementara itu di Aceh, banyak perempuannya yang progresif tidak begitu mendukung Illiza. Akan tetapi, dia perempuan. Ia menunjukkan bagaimana perempuan dapat menjadi politisi berkuasa. Tampaknya fenomena itu menunjukkan kontradiksi. Terlepas dari posisinya yang konservatif. Meski saya kurang yakin apakah dia nantinya dapat berkontribusi meningkatkan partisipasi perempuan di politik. Situasi itu masih di dalam proses yang panjang.

Sebagai seorang sejarawan, anda telah mengetahui Aceh memiliki kemampuan bertahan, tidak hanya terhadap bencana alam macam tsunami, tetapi juga konflik antara negara dan GAM. Situasi itu turut cukup memengaruhi posisi perempuan, beberapa laporan menyebut kasus perkosaan, termasuk yang dilakukan para separatistis. Apa pendapat anda tentang situasi tersebut memengaruhi identitas perempuan Aceh, terutama terkait kemampuan mereka menjadi penyintas?

Saya rasa sulit untuk membuat kesimpulan umum terhadap hal tersebut, mengingat begitu banyak perbedaan. Salah satunya perempuan yang tinggal di perkotaan dan pedesaan, juga ragam pendidikan antara mereka yang menempuh edukasi tingkat tinggi, dengan yang tidak. Ada hal yang menarik saat mengamati hal tersebut. Namun, objek riset saya tidak begitu banyak menyinggung soal konflik tersebut. Namun, mendengar sejumlah keterangan dari sejawat, wartawan, atau kawan yang telah berkunjung ke wilayah terdampak konflik itu, tampak kurangnya dukungan perempuan terhadap GAM. Pasalnya, sejumlah kekerasan yang banyak dilakukan pihak itu, khususnya yang ada dalam pernikahan dan menimpa perempuan menjadi alasannya. Namun, satu hal penting, perempuan menjadi pihak penting dalam perjuangan bertahan itu. Melacak jejak historisnya, perempuan pejuang telah ada sejak zaman Cut Nyak Dien dan Cut Meutia.

Akan tetapi saya cukup ragu mengasosiasikan kemampuan bertahan/menyintas itu dengan adanya konflik. Rakyat Aceh memang terbiasa berjuang, mengangkat senjata, sejak masa kolonial dan melawan Jepang, misalnya. Akan tetapi, kemampuan bertahan itu tidak sekadar mengangkat senjata dan terlibat dalam perang. Melainkan, daya itu lebih terarah pada bertahan dari situasi terburuk, kondisi yang sulit. Maksudnya, kemampuan menyintas itu terkait bagaimana seseorang dapat bertahan dari lingkungan atau kondisi yang buruk, terkait dengan tidak menyerah walau telah kehilangan keluarga dan

kepemilikan. Banyak dari mereka yang sebenarnya bukan pelaku konflik, atau terlibat dalam internal GAM. Melainkan, mereka banyak yang menjadi korban dan memiliki sejarah hidup yang keras dan sulit. Belum lagi ditambah adanya tsunami. Kesemua itu menjadikan diri mereka kuat. Menurut saya kemampuan menyintas tidak hanya mengangkat senjata atau terlibat dalam konflik, tetapi lebih dari itu.

Dalam presentasi anda beberapa waktu lalu, sempat disebut Qanun Jinayah, apakah anda sempat mengetahui reaksi perempuan Aceh yang menolak tindakan tersebut, khususnya saat ditangkap, dilecehkan, dan dipermalukan depan publik?

Tidak sebetulnya mengingat hal itu cukup berisiko. Persoalannya, mereka tidak dapat berbicara bebas karena hal itu dapat menimbulkan masalah. Persoalan itu agaknya mungkin ditempatkan dalam kampanye anti-syariah. Namun, persoalannya ketika pertentangan itu disuarakan di media, situasi menjadi polemik. Tentu lebih mudah membuat penilaian hitam dan putih atas tindakan. Akan tetapi, masalahnya, saat ada suara menolak atau menentang syariah, maka ujungnya adalah dianggap anti-Islam. Padahal, Islam tidak sekadar hukum syariah. Dengan begitu, banyak orang akan berpikir dua kali untuk melakukan hal demikian. Meski begitu, mereka memiliki organisasi tertentu di belakang layar, misalnya para NGO, lembaga sosial, atau lembaga pendidikan, misalnya UIN/IAIN (Universitas Islam Negeri/Institut Agama Islam Negeri).

Tentu mereka harus berbicara, tetapi hal itu tidak mudah dilakukan, mengingat halangan yang ada pada keluarga, juga tetangga di lingkungan tinggal. Mungkin, pendapat anonim dapat dilakukan, misalnya melalui pesan singkat/SMS, meski saya tidak tahu apakah ada media di Indonesia yang menerima pesan singkat anonim. Misalnya tentang hipokrisi yang terjadi di pemerintahan. Intinya, tidak banyak orang yang terbiasa berbicara terbuka di depan publik menentang persoalan itu. Isu lainnya, apa yang dimaksud dengan publik? Atau berbicara di depan publik? Apakah debat publik termasuk? Dalam konteks itu, banyak orang cukup kritis dengan bersuara di Serambi Indonesia. Meski media itu cukup konservatif dan pro syariah.

Terlepas dari situasi itu, hal yang dapat dipahami agaknya banyak orang percaya bahwa rakyat Aceh belum siap menerima hukum syariah. Ada

kepentingan lebih urgen, misalnya mengembangkan pendidikan. Pasalnya, syariat Islam di sana hanya berlaku untuk masyarakat miskin saja. Ingat, *tajam ke bawah tumpul ke atas*. Namun, tidak banyak yang ingin bersuara lantang mengkritisi hal itu. Pasalnya, konsekuensi ke depannya cukup fatal, yaitu dicap anti-Islam, karena syariah diandaikan penting. Padahal, ketentuan itu dibuat oleh manusia yang memuat kepentingan politis. Meski begitu, barangkali situasi sulit yang mereka hadapi menuntun rakyat aceh untuk kembali ke jalan agama. Ada anggapan bencana yang terjadi adalah ujian, peringatan, dan ada hikmah di balik peristiwa tersebut

Mengenai Qanun Jinayah, banyak perbincangan vokal mengenai perda syariah, khususnya tentang tubuh perempuan dalam beberapa waktu belakang. Fenomena itu dinilai sebagai kemunduran mengingat perkembangan gerakan feminisme di Indonesia. Merujuk pengamatan anda, ada pemimpin perempuan di sejumlah lembaga agama sulit ke depannya memasuki kancah pimpinan politik. Namun, melihat banyaknya peraturan diskriminatif di daerah itu, apakah mungkin, perempuan memiliki masa depan cerah dalam urusan kepemimpinan?

Sebelumnya, hal itu tergantung dari bagaimana masa depan yang baik itu dipahami. Bagi para konservatif, banyak perempuan yang memimpin terbilang baik. Kemungkinannya tentu ada, yaitu peningkatan pemimpin perempuan di Aceh. Situasi yang diharapkan nyatanya perempuan yang memimpin dan progresif. Akan tetapi, persoalannya bagaimana jika ke depan nanti banyak pemimpin perempuan tetapi kurang progresif, baik mereka yang masih terkungkung dalam patriarki, atau otoriter dalam gaya kepemimpinannya. Perlu diketahui, Islam di Indonesia kini cukup konservatif dibanding satu hingga dua dekade ke belakang, dan situasi itu mencakup para perempuannya. Sulit untuk memprediksi masa depan Aceh, mengingat situasi yang terjadi, semakin religius, banyak yang cenderung konservatif. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dunia. Akan tetapi, ke depan, mungkin akan tampil pemimpin perempuan, baik dari kalangan yang progresif, juga konservatif. Persoalannya, sebagai seorang sejarawan saya harus hati-hati dalam membuat prediksi ke depan. Prediksi yang mungkin diungkap, ke depan akan banyak pemimpin perempuan, tetapi mereka yang konservatif. Namun, saya mungkin saja bisa salah.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
 - Prof. Jeffrey Winters
- Prof. Rachmi Diah Larasati
 - Prof. Merlyna Lim
 - Dr. Kristi Poerwandari
 - Dr. Ida Ruwaida Noor
 - Dr. Arianti Ina Restiani
 - Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.
 - Sari Andajani, PhD.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: Mengapa SOGIE (<i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i>)?.....	iii
Artikel / Articles	
<ul style="list-style-type: none"> • Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE (<i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i>) di Nusantara / <i>Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic: Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara</i>..... 	269-288
<i>BJD. Gayatri</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM (<i>Female to Male</i>) di Jakarta / <i>Self, Body, and Relation: a Study of FTM Transgender in Jakarta</i>..... 	289-302
<i>Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno & Dewi Candraningrum</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • "Mengapa Saya Mendirikan Suara Kita?" Sebuah Memoar / <i>"Why I founded Our Voice": a Memoir</i> 	303-308
<i>Hartoyo</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual terhadap Lesbian, Biseksual, dan Transgender <i>Female-to-Male</i> di Indonesia / <i>Causes or Cures? Sexual Violence against Lesbian, Bisexual and Transgender Female-to-Male in Indonesia</i>..... 	309-314
<i>Ayu Regina Yolandasari</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia / <i>Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News Media in Indonesia</i>..... 	315-320
<i>Sari Andajani, Dinar Lubis & Sharyn Graham-Davies</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat / <i>Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in the Context of Indonesia and Western Europe Society</i> 	321-327
<i>Tanti Noor Said</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer / <i>Mapping Body, Gender, and Sexuality in Queer Studies</i>..... 	329-338
<i>Hendri Yulius Wijaya</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia / <i>LGBT's Human Rights in the Indonesian Interior Policies</i>..... 	339-355
<i>Yulianti Muthmainnah</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • LGBT, Agama dan HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl / <i>LGBT, Religion, and Human Rights: a Study on Khaled M. Abou El-Fadl's Thoughts</i> 	357-366
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • "Makna Hidup" Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian Queer di Jakarta / <i>"Meaning of Life" for LGBT when State Ignores: a Queer Study in Jakarta</i>..... 	367-376
<i>Gadis Arivia dan Abby Gina</i>	
Wawancara / Interview	
<ul style="list-style-type: none"> • David Kloos: "Perempuan Konservatif Mendominasi Formasi Kepemimpinan" / <i>David Kloos: "Conservative Women dominate Formation of Leadership"</i>..... 	377-381
<i>Saras Dewi</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	
383-385	
Profil / Profile	
<ul style="list-style-type: none"> • Hana Salomina Hikayobi: "Terpanggil untuk Menyuarakan Kaum Tak Bersuara" / <i>Hana Salomina Hikayobi: "Compelled to voice the Voiceless"</i> 	387-392
<i>Dewi Candraningrum & Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
<ul style="list-style-type: none"> • Tombois dan Femmes: Menantang Label Gender di Padang / <i>Tombois and Femmes: Against Gender Label in Padang</i>..... 	393-395
<i>Nadya Karima Melati</i>	
Tokoh / Heroine	
<ul style="list-style-type: none"> • Tunggal Pawestri: "Dukungan Terbuka terhadap LGBT akan Mengundang Dukungan Yang Lain" / <i>Tunggal Pawestri: "Open Support for LGBT invite Other Support"</i>..... 	397-404
<i>Anita Dhewy</i>	

